



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LKjIP
2023

TAHUN 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Jl. Soekarno Hatta No 153 Kebumen
Telp.(0287) 381518, 381989, Website: www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Email: dinsosp3a@kebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen atas kinerjanya, baik keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih maupun kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023. Lebih dari itu, laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen, selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran konstruktif untuk penyempurnaannya sangat diharapkan. Kepada para pejabat struktural maupun staf di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023 kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Suliyanto, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196505211986031011

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris	<i>hs</i>	
Ka. Bidang		
Subkor	<i>fb</i>	
.....		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban tugas di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2023 ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melaksanakan 2 urusan, 13 Program, 27 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan APBD sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 yaitu untuk mencapai dua sasaran yang berarti bahwa seluruh kegiatan tersebut di harapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil penilaian sendiri/*Self assessment* atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023, menunjukkan rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran yang telah ditetapkan adalah 100% (Baik). Keberhasilan ini merupakan kontribusi dari dua sasaran yaitu:

1. Prosentase capaian SPM Sosial : 100%
2. Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak : 100%

Keberhasilan dari sasaran-sasaran ini secara umum disebabkan oleh komitmen dari personel pelaksana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Suliyanto, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda- IV/c
NIP. 196505211986031011

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Fungsi Strategis	6
1.3 Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.5 Sistematika Penyusunan LkjIP	9
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran	56
3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	66
3.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial P3A	67
Bab IV Penutup	
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...	69
4.2 Permasalahan/Kendala	70
4.3 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	72
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	2
Tabel	1.2	Data Pegawai berdasarkan tingkat pangkat dan golongan	2
Tabel	1.3	Data Pegawai berdasarkan jenis jabatan	2
Tabel	1.4	Sarana dan Prasarana	3
Tabel	2.1	Target indikator kinerja utama daerah	13
Tabel	2.2	Target indikator kinerja utama OPD	14
Tabel	2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023	14
Tabel	2.4	Perjanjian kinerja perubahan kepala dinas tahun 2023 Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen	15
Tabel	2.5	Program dan anggaran perjanjian kinerja perubahan tahun 2023	16
Tabel	3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	18
Tabel	3.2	Target dan realisasi tahun 2023	20
Tabel	3.3	Capaian SPM Sosial	21
Tabel	3.4	Rekapitulasi korban kekerasan berbasis gender dan anak.....	22
Tabel	3.5	Perbandingan capaian kinerja tahun 2021, 2022, 2023	23
Tabel	3.6	Kemajuan capaian sasaran strategis	24
Tabel	3.7	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian provinsi	26
Tabel	3.8	Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi	28
Tabel	3.9	Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya	43
Tabel	3.10	Keterkaitan sasaran dan program/kegiatan	49
Tabel	3.11	Capaian anggaran program dan kegiatan tahun 2023	56
Tabel	3.12	Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 dan 2023	65
Tabel	3.13	Reviu evaluasi akuntabilitas kinerja instansi	

	pemerintahan tahun 2022	66
Tabel 3.14	Nilai indeks kepuasan masyarakat IKM Dinas Sosial P3A.	67
Tabel 3.15	Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pada Unit Penyelenggara Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Triwulan 4 Tahun 2023.	68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur organisasi dan tata kerja dinsos P3A Kab. Kebumen	5
--	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan 2023

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2023

Prestasi yang telah di capai di tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Gambaran Umum Organisasi

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana dan melembaga yang meliputi berbagai intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi–institusi sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang sifatnya pelayanan dasar yang harus dilaksanakan setiap pemerintah daerah. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang sosial yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dengan tugas pokok dalam penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang

rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. pelaksanaan administrasi Dinas;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut:

Table 1.1
Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SLTA	2	2	4
4	D1-D3	-	2	2
5	S1	3	7	10
6	S2	3	4	7
JUMLAH		8	15	23

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

Tabel 1.2
Data pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

	Golongan														
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Jumlah Personil	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	3	4	6	1	1

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

Table 1.3
Data pegawai berdasarkan jenis jabatan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	9

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
2	Fungsional	4
	Staf	10
Jumlah		23

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Untuk mendukung kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen perlu pembentukan struktur Organisasi. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas membawahi:
 - Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - Sub bagian keuangan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

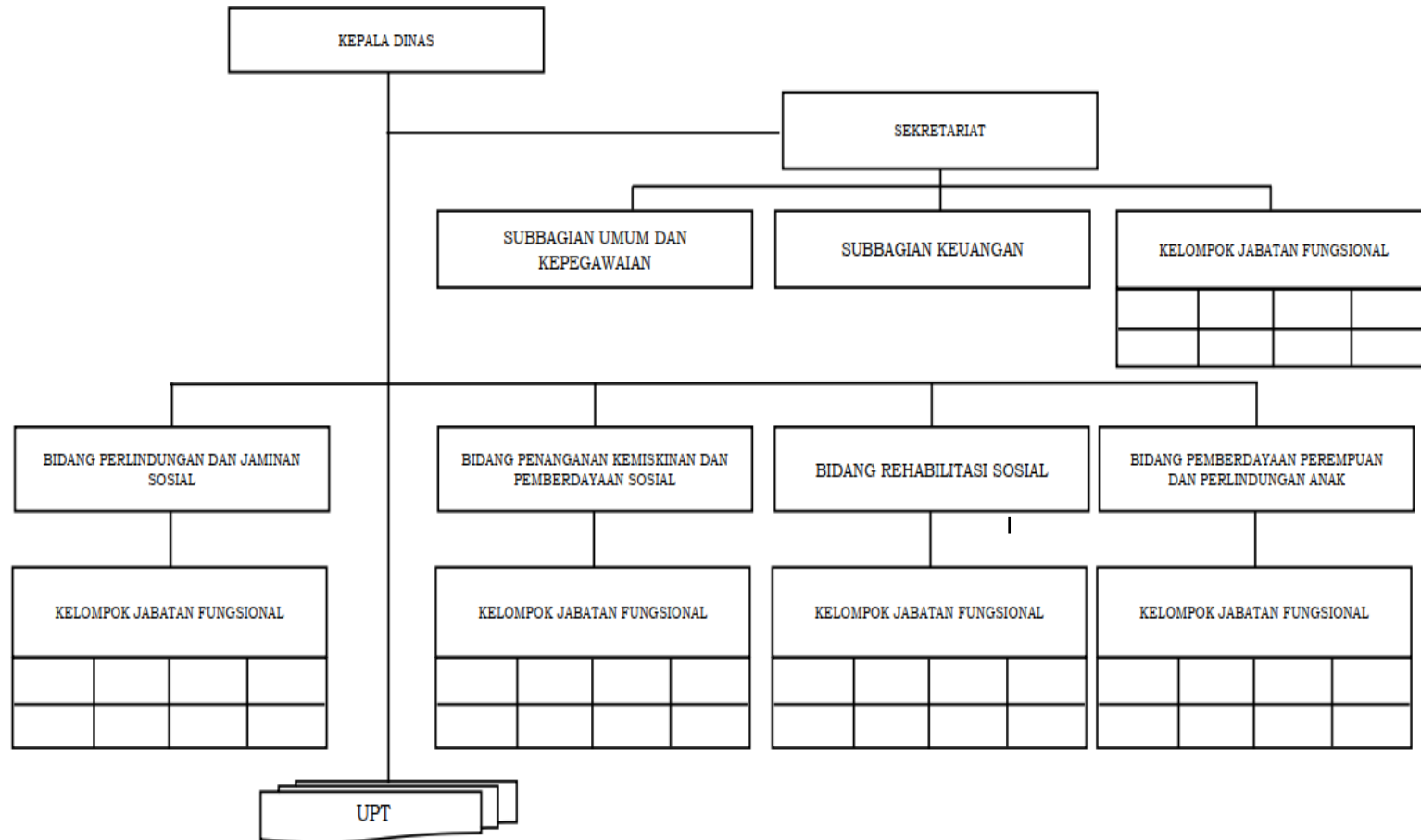
Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial
- d. Bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial
- e. Bidang Rehabilitasi sosial

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Kelompok jabatan fungsional

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan tata kerja Dinsos P3A
Kabupaten Kebumen



Sumber: Perbup no 116 tahun 2021

1.2 Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” dengan melaksanakan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melalui misi yaitu Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah guna memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Adapun dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Kebumen, Dinas Sosial P3A melaksanakan strategi:

1. Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penurunan kemiskinan

Sedangkan dalam pelaksanaan hal tersebut, kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di arahkan kepada:

1. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar PPKS terlantar di luar panti dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar PPKS terlantar di luar panti;
2. Pemberian kegiatan bimbingan sosial terhadap keluarga fakir miskin dan pengelolaan data kemiskinan dan PPKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data DTKS yang telah tervalidasi;

3. Penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana kabupaten dan diarahkan pada peningkatan prosentase penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana kabupaten;
4. Penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan prosentase peran PSKS dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial bagi PPKS.

Adapun kebijakan pada urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- 2) Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

1.3 Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - a. Ada beberapa Penerima Manfaat (PM) yang meninggal dunia dan pindah domisili;
 - b. Data PPKS yang dinamis;
 - c. Masih didapati PPKS yang belum masuk ke DTKS sehingga menghambat tahap intervensi;
 - d. Penanganan PPKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran, sementara kasus baru sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera.
 - e. Banyaknya pengemis, gelandangan dan orang terkantar (PGOT) dan ODGJ terlantar sementara di Kebumen belum ada lembaga yang secara khusus menangani
2. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a. Tidak ada perangkingan/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS;

- b. DTKS tidak relevan untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA;
 - c. Pembaharuan menu aplikasi oleh Pusdatin tidak disertai dengan sosialisasi ke pengelola DTKS Kabupaten/Kota.
 - d. kendala dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pusdatin dikarenakan tidak adanya kontak person yang dapat memberikan solusi setiap permasalahan atau komplain
 - e. Kabupaten/kota hanya bisa melakukan usulan, untuk berhasil atau tidaknya sepenuhnya keputusan Pusdatin Kesos Kemensos RI
3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan migran korban tindak kekerasan
 - a. Masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang resiko dan penanggulangan bencana.
 - b. Kesulitan mencari relawan yang aktif berperan serta dalam penanggulangan bencana
 - c. Fasilitasi dan penyediaan bansos/bankeu diberikan pada buruh migran sesuai jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen
 4. Sementara permasalahan utama yang dihadapi Dinsos P3A dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:
 - a. Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak
 - b. Belum optimalnya peran Gugus Tugas KLA;
 - c. Masih rendahnya jumlah Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Masih rendahnya sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak.
 - e. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 - f. Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen
 - g. Rendahnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak;
 - h. Belum optimalnya peran Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - i. Belum optimalnya pemanfaatan data pilah gender sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan;

- j. Belum semua sekolah di semua tingkatan menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA);
- k. Belum semua desa menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA);
- l. Belum terbentuknya UPTD PPA;
- m. Masih kurangnya fasilitas bermain yang ramah anak yang aman, nyaman, dan tidak berbayar.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 adalah dalam rangka melaksanakan Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bahwa Setiap Instansi Pemerintah Secara Berjenjang Wajib Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Melalui Media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Dinsos P3A Tahun 2023 antara lain :

- a. mempertanggungjawabkan kinerja Dinsos P3A kepada Bupati dan semua pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
- b. memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinsos P3A.

1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP

Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Maka Sistematika Penyusunan LKjIP Dinsos P3A kabupaten kebumen sebagai berikut:

Sampul Depan	
Ikhtisar Eksekutif	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Perencanaan Kinerja
	2.1 Perencanaan Strategis
	2.2 Perjanjian Kinerja
Bab III	: Akuntabilitas Kinerja
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	3.2 Realisasi Anggaran
	3.3 Hasil Reviu Dan Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
	3.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Dinas Sosial P3a
Bab IV	: Penutup
Lampiran-Lampiran	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2021-2026.

a. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025, Visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 adalah:

“Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Argobisnis”

Dan dari empat Visi yang akan dilaksanakan dalam RPJPD yang meliputi: (1) mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat, (2) membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya, (3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, serta (4) memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional dan internasional demi kesejahteraan rakyat; maka misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah Misi kedua dan Misi keempat untuk menunjang visi Bupati Kebumen yaitu:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat”

Berdasarkan Visi Bupati Kebumen maka ditetapkan Misi Bupati Kebumen:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mendukung Misi

Dua

“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya”

Tiga

“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”

Untuk mendukung visi dan misi Bupati tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

b. Tujuan

Pembentukan visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen yakni

1. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak;
2. Berkurangnya penduduk miskin.

c. Sasaran

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (outcome) yakni yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 2) Meningkatnya mutu layanan sosial.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen akan diukur pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Persentase capaian SPM Sosial. Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Pemilihan dan penetapan IKU Daerah Kabupaten Kebumen mempertimbangkan ketercapaian Visi Misi daerah dan arah kebijakan strategis, kelaziman indikator makro pada bidang tertentu, kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja daerah dan bidang kewenangan, tugas, fungsi dan peran lainnya. Selengkapnya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama Daerah

No	Tujuan	Indikator tujuan /sasaran	Satuan	Target kinerja tujuan /sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,25	93,35	93,45	93,55	93,65

No	Tujuan	Indikator (Indeks)	Satuan	Target kinerja tujuan /sasaran				
2	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	%	16,00-17,00	15,00-16,00	14,0-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2023

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama OPD

No	Sasaran	Indikator tujuan /sasaran	Satuan	Target kinerja tujuan /sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2023

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan /sasaran	Satuan	Target 2023
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	Indeks	93,35%
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100
2	Berkurangnya penduduk miskin		Tingkat kemiskinan	%	15,00-16,00
		Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM sosial	%	100

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2023

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud,

tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2021-2026, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 berikut Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2023
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,35
		Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100
2.	Berkurangnya penduduk miskin		Tingkat Kemiskinan	%	15,00-16,00
		Meningkatnya mutu layanan Sosial	Persentase Capaian SPM Sosial	%	100

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

*) angka realisasi 2022

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui

program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Indikator kinerja	Target	Anggaran 2023
1.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.554.504.000
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	70%	38.030.000
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	3.384.000
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	100%	1.833.139.000
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial	75,25%	3.240.994.000
6.	Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100%	779.335.000
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang dikelola	100%	14.200.000
8.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	15,63%	592.281.000
9.	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	100%	141.840.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	15,63%	30.644.000
11.	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100%	31.996.000

No	Program	Indikator kinerja	Target	Anggaran 2023
12	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	142.622.000
13	Program perlindungan khusus anak	Cakupan Perlindungan Anak	100%	262.701.000
	TOTAL			11.665.670.000

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih Dari 100%	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang Dari 50%	Sangat Kurang

Agar dapat dilakukan pengukuran kinerja maka dibutuhkan data kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan berupa indikator output maupun indikator outcome yang dapat direalisasikan dari masing masing program dan kegiatan. Data kinerja dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang bersumber dari:

- Laporan Target, Realisasi Fisik dan Keuangan;
- Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023;
- LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;

Data terkumpul kemudian disusun dan diolah menjadi data kualitatif maupun kuantitatif dari indikator kinerja suatu sasaran strategis maupun indikator kinerja utama dari sasaran.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2021). Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (tahun 2023) dan DPA Perubahan tahun 2023. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan DPA Perubahan 2023.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja. Pada Tahun Anggaran

2023, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan 4 (empat) skala pengukuran dengan rumus dan kategori sebagai berikut: Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun hasil pengukuran kinerja capaian organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.2
Target dan Realisasi tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
	Tujuan					
1	berkurangnya penduduk miskin	tingkat kemiskinan	15,00-16,00	16,34	99,87	Baik
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	93,35	93,26*)	99,90	Baik
	Sasaran					
1	meningkatnya mutu layanan sosial	persentase capaian SPM Sosial	100	100	100	Baik
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Baik

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

*) angka capaian tahun 2022

Capaian realisasi Indikator tujuan tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 16,34% dari target 15,00-16,00% dengan capaian kinerja sebesar 99,87%. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Baik.

Realisasi indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 sebesar 93,26% dari target 93,35% dengan capaian sebesar 99,90%. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Baik. Capaian angka IPG tahun 2023 masih menggunakan realisasi tahun 2022, karena sampai dengan laporan ini di buat BPS belum merilis indeks pembangunan gender tahun 2023.

Sementara itu realisasi indikator sasaran meningkatnya mutu layanan sosial yaitu persentase capaian SPM sosial tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja adalah Baik. pencapaian indikator kinerja / jenis layanan spm sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian SPM Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	783	783	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	261	261	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	242	242	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	118	118	100%
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	895	895	100%

Sumber : SPM Bangda, 2023

Realisasi indikator sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja adalah Baik. Berikut adalah daftar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dan tertangani:

Tabel 3.4
Rekapitulasi korban kekerasan berbasis gender dan anak

No	Korban kekerasan yang melapor		Korban kekerasan yang tertangani		Capaian (%)	
	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan
1	66	55	66	55	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2023

Dari tabel diatas capaian rekapitulasi korban kekerasan berbasis gender dan anak adalah 100%

2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu

Tabel 3.5
Perbandingan capaian kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	2021 (%)			2022 (%)			2023 (%)		
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
	Tujuan										
1	berkurangnya penduduk miskin	tingkat kemiskinan	15,45	17,83	84,59	16,00-17,00	16,41	103,47	15,00-16,00	16,34	97,87
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	93,15	93,06	99,90	93,25	93,26	100,01	93,35	93,26*)	99,90*)
	Sasaran										
1	meningkatkan mutu layanan sosial	persentase capaian SPM Sosial	100	100	100	100	99,93	99,93	100	100	100
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2023

*) angka capaian sementara tahun 2022

Realisasi indikator tujuan tingkat kemiskinan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Kebumen terus mengalami penurunan. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah kabupaten Kebumen telah berhasil dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Namun demikian, untuk tahun 2021 dan 2023 belum bisa mencapai target yang ditetapkan, hanya ditahun 2022 yang bisa mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi indikator tujuan Indeks pembangunan gender (IPG) tahun 2021-2023 Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Namun demikian, untuk tahun 2021 dan 2023 belum bisa mencapai target yang ditetapkan, hanya ditahun 2022 yang bisa mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi indikator sasaran persentase capaian SPM Sosial dalam tiga tahun terakhir mencapai 100%, kecuali pada tahun 2022 sebesar 99,93 yang disebabkan oleh penerima manfaat bantuan sosial sebagian besar kelompok rentan sehingga menimbulkan resiko penerima manfaat meninggal dunia atau pindah domisili.

Realisasi indikator sasaran Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam tiga tahun terakhir selalu mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa setiap laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat di tangangi oleh Dinsos P3A.

3. Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah

Tabel 3.6
Kemajuan capaian sasaran strategis

No	Tujuan /sasaran	Indikator kinerja	Capaian 2023 (%)	Target akhir 2026 (%)	Tingkat kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6(4/5*100)
	Tujuan				
1	berkurangnya penduduk miskin	tingkat kemiskinan	16,34	13,00-13,50	78,96
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	93,26*)	93,65	99,58
	Sasaran				
1	meningkatnya mutu layanan	persentase capaian SPM	100	100	100

No	Tujuan /sasaran	Indikator kinerja	Capaian 2023 (%)	Target akhir 2026 (%)	Tingkat kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6(4/5*100)
	sosial	Sosial			
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100

Sumber: Dinsos P3A, 2023

*) angka capaian sementara tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, untuk indikator tujuan tingkat pencapaian masih dibawah 100%. Untuk tingkat kemiskinan pencapaiannya sebesar 78,96%, dan untuk IPG sebesar 99,58%.

Sementara itu untuk indikator sasaran tingkat sasarnya sudah sesuai dengan target akhir jangka menengah, yaitu di angka 100% baik untuk indikator persentase capaian SPM Sosial maupun Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian Provinsi

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian Provinsi

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Capaian 2022 (%)		Capaian 2023 (%)		
			OPD	Jawa Tengah	OPD	Jawa Tengah	% capaian
1	2	3	4	5	7	8	10
	Tujuan						
1	berkurangnya penduduk miskin	tingkat kemiskinan	16,41	10,93 <small>*BPS JATENG</small>	16,34	10,77 <small>*BPS JATENG</small>	48,28
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	93,26	92,83 <small>*BPS JATENG</small>	93,26*)	92,83*)	100,46*)
	Sasaran						
1	meningkatnya mutu layanan sosial	persentase capaian SPM Sosial	99,93	100	100	100	100
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos P3A, 2023

*) angka capaian sementara tahun 2022 (IPG tahun 2023 belum di rilis oleh BPS)

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk indeks pembangunan gender (IPG) kabupaten kebumen sudah berada diatas Provinsi Jawa Tengah. Sasaran persentase capaian SPM Sosial dan Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah sesuai dengan standar Provinsi, yaitu 100%.

5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang telah dilakukan

Guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam pelaksanaanya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai beberapa program pendukung strategi ditahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

- a. Program pendukung sasaran strategis Meningkatnya mutu layanan social antara lain:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
 - 2) Program Pemberdayaan Sosial;
 - 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan;
 - 4) Program Rehabilitasi Sosial;
 - 5) Program Perlindungan Sosial;
 - 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - 7) Program Penanganan Bencana;
- b. Program pendukung sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak antara lain:
 - 8) Program Pengarusutamaan gender;
 - 9) Program perlindungan perempuan;
 - 10) Program peningkatan kualitas keluarga;
 - 11) Program pengelolaan sistem data gender dan anak;
 - 12) Program pemenuhan hak anak (PHA);
 - 13) Program perlindungan khusus anak.

Tabel 3.8
Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
Sosial							
	Berkurangnya Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	15,00-16,00	16,34	97,87	Faktor penghambat : - Belum optimalnya pelaksanaan verval dalam peningkatan validitas data DTKS - Belum optimalnya upaya-upaya pemberdayaan bagi masyarakat miskin, lebih banyak pada intervensi charity yang tidak berkelanjutan - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mandiri dan lepas dari bantuan sosial.	Solusi atas permasalahan yang ditemui: - Optimalisasi pembinaan operator desa/kelurahan dan fasilitator puskesmas dalam pengelolaan data kemiskinan dan optimalisasi monitoring dan pelaporan secara berkelanjutan oleh kecamatan dan Dinsos P3A - Pemberdayaan masyarakat miskin (meningkatkan pendapatan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin oleh pendamping sosial) - Memberikan motivasi kepada masyarakat yang sudah mampu

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
							untuk graduasi dari kepesertaan bansos
	Meningkatnya Mutu Layanan Social	Prosentase Capaian SPM Sosial	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target :</i></p> <p>1. untuk indikator layanan SPM terkait rehabilitasi sosial dasar di luar panti antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudahnya koordinasi dan adanya dukungan dari Pemerintahan desa terkait dengan kelengkapan data dukung penerima manfaat, proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat serta kerjasama dengan lintas sektoral dan Lembaga atau Badan terkait sehingga mengurangi resiko tidak tercapainya target SPM Sosial karena adanya PM yang meninggal dunia, pindah, 	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoring dan evaluasi secara berkala serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lintas sektoral untuk mengusulkan kembali penerima manfaat pengganti di anggaran perubahan untuk PM yang meninggal dunia, pindah domisili maupun yang tidak memenuhi kriteria - menyiapkan anggaran dan personil yang cukup serta koordinasi dengan pihak terkait yang menangani kebencanaan terkait ketersediaan logistik bencana dan

DINSOS P3A | 2023

Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
					<p>maupun tidak tepat sasaran seperti tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>2. untuk indikator layanan SPM terkait Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - adanya bantuan logistik bencana dari kementerian sosial dan Dinas sosial provinsi Jateng - keaktifan relawan untuk membantu korban bencana <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerima Manfaat terdiri dari kelompok rentan sehingga rawan meninggal dunia dan pindah domisili - bencana tidak dapat diprediksi 	relawan bencana

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target :</i> adanya dukungan anggaran APBD</p> <p><i>Permasalahan yang masih di temui :</i> Terdapat beberapa pegawai yang pensiun dan belum terdapat penggantinya</p>	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> Mengajukan usulan kebutuhan pegawai</p>
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan sosial	70	70,51	100,7	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target :</i> adanya dukungan anggaran APBD untuk peningkatan SDM walaupun belum cukup untuk mengcover semua SDM Kesos yang ada</p> <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i> belum adanya materi pelatihan yang standar dari pemerintah pusat atau provinsi</p>	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> Mengacu pada perundang-undangan yang berlaku terkait SDM kesejahteraan sosial</p>
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target :</i> Terfasilitasinya Migran yang mengalami kekerasan</p> <p><i>Permasalahan yang masih</i></p>	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> Peningkatan sosialisasi / informasi tentang bantuan untuk Migran yang mengalami</p>

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						<i>di temui:</i> Migran yang mengalami kekerasan tidak bisa diprediksi	kekerasan
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS diluar panti kewenangan kabupaten yang tertangani	100	104,94	104,94	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudahnya koordinasi dan adanya dukungan dari Pemerintahan desa terkait dengan kelengkapan data dukung penerima manfaat, proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat serta kerjasama dengan lintas sektoral dan Lembaga atau Badan terkait sehingga mengurangi resiko tidak tercapainya target karena adanya PM yang meninggal dunia, pindah, maupun tidak tepat sasaran seperti tahun-tahun sebelumnya. <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerima Manfaat terdiri dari kelompok 	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoring dan evaluasi secara berkala serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lintas sektoral serta mengusulkan kembali penerima manfaat pengganti di anggaran perubahan apabila ditemukan PM yang meninggal dunia, pindah domisili maupun yang tidak memenuhi kriteria

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						rentan sehingga rawan meninggal dunia dan pindah domisili	
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan jaminan sosial	77,25	83,3	107,83	<p>Faktor pendorong tercapainya target : adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial</p> <p>Permasalahan yang masih di temui: update DTKS belum optimal pada semua desa/kelurahan</p>	Solusi atas permasalahan yang ditemui: Sosialisasi/pelatihan bagi operator desa/kelurahan
6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - adanya bantuan logistik bencana dari kementerian sosial dan Dinas sosial prov jateng - keaktifan relawan untuk membantu korban bencana <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerima Manfaat terdiri dari kelompok rentan sehingga rawan meninggal dunia dan 	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - menyiapkan anggaran dan personil yang cukup serta koordinasi dengan pihak terkait yang menangani kebencanaan terkait ketersediaan logistik bencana dan relawan bencana

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						<p>pindah domisili</p> <ul style="list-style-type: none"> - bencana tidak dapat diprediksi 	
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang di kelola	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target:</i> Koordinasi dengan OPD terkait untuk pemeliharaan dan rehabilitasi TMP serta koordinasi dengan keluarga pahlawan untuk pembiayaan pemakaman pahlawan</p> <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i> penganggaran hanya untuk honor petugas kebersihan</p>	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> Mengajukan permohonan anggaran untuk pemakaman pahlawan/veteran dan rehabilitasi TMP</p>
	P3A						
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,35	93,26*	99,90	<p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, Pengeluaran Per Kapita perempuan, angka partisipasi perempuan dalam parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga masih rendah 	<p>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Gerakan Ayo Sekolah untuk mencegah Angka Putus Sekolah, pendidikan politik perempuan, sosialisasi PUG ke

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya daya saing tenaga kerja perempuan - Rendahnya aksesibilitas perekonomian terhadap pendapatan keluarga - Budaya patriarki yang masih kental di masyarakat 	masyarakat lebih masif lg - Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - optimalisasi pemberian layanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak <p>Sudah terjalin kerjasama yang baik dgn mitra pemberi layanan (penegak hukum, kesehatan, advokat) dan ada MOU dgn semua RS yg ada di wilayah Kebumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender - Peraturan Daerah 	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan upaya masif baik secara langsung ataupun melalui media terkait peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialaminya - Melakukan kerjasama dengan OPD lain yang terkait dan dunia usaha dalam upaya rehabilitasi perempuan di bidang ekonomi agar korban perempuan tetap berdaya - Pembentukan UPTD

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						<p>Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2013 tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat bergantung pada pelaporan kasus 	<p>PPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perda yang baru terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						kekerasan dari masyarakat, termasuk dari institusi terkait - pemberi layanan tidak dapat memberikan layanan secara optimal karena korban menolak meneruskan laporan kasusnya - Adanya fakta budaya (keengganan/ malu/ tidak ada keberanian) perempuan korban kekerasan untuk melapor.	
8	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	15,63	51,36	328,59	<i>Faktor pendorong tercapainya target :</i> • Bekerjasama dengan OPD terkait, PKK, organisasi kemasyarakatan lain yang memiliki kegiatan terkait pelatihan bagi masyarakat/ perempuan • Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender • Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43	<i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dalam peningkatan pemberdayaan perempuan terutama dalam hal pemasaran produk yang sudah diproduksi oleh kelompok perempuan

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						<p>Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Belum semuanya kegiatan pemberdayaan perempuan menjangkau ke semua desa Adanya fakta budaya bahwa perempuan tugasnya adalah di rumah dan tugas mencari nafkah adalah laki-laki Rendahnya kepercayaan diri perempuan dibanding laki-laki 	
9	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perlindungan perempuan	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target :</i> adanya komitmen stakeholder terkait dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan</p>	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> Sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan</p>

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						terhadap perempuan <i>Permasalahan yang masih di temui:</i> Takut/malu melapor	
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan program peningkatan kualitas keluarga	15,63	20	127,95	<i>Faktor pendorong tercapainya target :</i> Bekerjasama dengan LSM Migran Care dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus yang berhubungan dengan PMI (Purna Migran Indonesia) <i>Permasalahan yang masih di temui:</i> <ul style="list-style-type: none"> •Belum semua Kecamatan dan Desa dibentuk Pokja Bina Keluarga TKI (BK TKI) •Belum semua kecamatan dan desa paham tentang pentingnya Pokja BK TKI 	<i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> Pembentukan Pokja BK TKI di semua Kecamatan dan Desa
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	100	100	100	<i>Faktor pendorong tercapainya target :</i> - Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 263/354 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Data	<i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> - Penambahan volume Rakor Forum Data Pilah Gender Kab.

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
						<p>Pilah Gender Kabupaten Kebumen</p> <p>- Rapat Koordinasi Forum Data Pilah Gender Kab. Kebumen secara rutin 2 kali setahun.</p> <p>Permasalahan yang masih di temui: Pengumpulan data dari pemberi data sering tidak tepat waktu sehingga pengolahan data mengalami keterlambatan dan terdapat pemilik data belum memperhatikan pilah gender</p>	<p>Kebumen setiap tahunnya</p> <p>- Data Pilah Gender dikolaborasikan dengan Satu Data Kabupaten Kebumen</p>
12	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kategori kabupaten layak anak (KLA)	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong tercapainya target</i> : komitmen pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)</p> <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i> kegiatan responsif anak belum semuanya sesuai dengan indikator KLA</p>	<p><i>Solusi atas permasalahan yang ditemui:</i> Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang dapat digunakan menjadi salah satu acuan dalam pengembangan KLA di Kabupaten Kebumen oleh masing-masing anggota Gugus Tugas KLA (RAD akan dievaluasi setiap tahun)</p>
13	Program Perlindungan	Cakupan	100	100	100	<p><i>Faktor pendorong</i></p>	<p><i>Solusi atas</i></p>

DINSOS P3A | 2023

Uraian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
	Khusus Anak	perlindungan anak				<p><i>tercapainya target : adanya komitmen stakeholder terkait dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak</i></p> <p><i>Permasalahan yang masih di temui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya fakta budaya (keengganan/malu/tidak ada keberanian) anak korban kekerasan untuk melapor. - Belum optimalnya peran KPAD (Kelompok Pelindungan Anak Desa) dalam pencegahan kasus kekerasan berbasis gender. 	<p><i>permasalahan yang ditemui:</i></p> <p>Peningkatan kapasitas bagi KPAD (Kelompok Pelindungan Anak Desa) untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di wilayahnya masing-masing</p>

Sumber: Dinsos P3A, 2023

*) Angka sementara capaian 2022

Dari tabel 3.8 tentang analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja disemua program tercapai.

6. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan jumlah dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Vapaian keluaran i

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 214/PMK.02/2017

Tabel 3.9
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja			Program/kegiatan	Capaian	Anggaran		Efisiensi
		Target %	Realisasi %	% capaian			Pagu	Realisasi	
1	Berkurangnya Penduduk Miskin	15.00-16.00	16,34	97,87					
	Meningkatnya Mutu Layanan Social	100	100	100			10.464.586.000	10.032.980.019	6,04
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	4.555.504.000	4.241.248.848	6,9
					Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	87.108.000	85.971.500	1,30
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.563.650.000	3.267.437.783	8,31
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	48.904.000	48.902.000	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	187.463.000	187.395.076	0,04
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	74.131.000	73.925.000	0,28
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	249.680.000	237.809.463	4,75
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,06	343.568.000	339.808.026	7,13
					Program Pemberdayaan Sosial	1,01	38.030.000	37.674.020	1,65

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja			Program/kegiatan	Capaian	Anggaran		Efisiensi
		Target %	Realisasi %	% capaian			Pagu	Realisasi	
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,01	38.030.000	37.674.020	1,65
					Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1	3.384.000	3.237.350	4,3
					Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	0	3.384.000	3.237.350	-
					Program Rehabilitasi Sosial	1,05	1.833.139.000	1.827.901.786	4,98
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1,05	1.293.253.000	1.289.746.350	4,98
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	1	539.886.000	538.155.436	0,32
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,08	3.240.994.000	3.136.613.405	10,25
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	3.240.994.000	3.136.613.405	3,22
					Program Penanganan Bencana	1	779.335.000	772.104.610	0,93
					Perlindungan Sosial Korban	1	638.276.000	631.760.559	1,02

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja			Program/kegiatan	Capaian	Anggaran		Efisiensi
		Target %	Realisasi %	% capaian			Pagu	Realisasi	
					Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota				
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	141.059.000	140.344.051	0,51
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	14.200.000	14.200.000	0
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	14.200.000	14.200.000	0
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	93,35	93,25	99,89					
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	100	100	100		1	747.713.000	743.187.849	36,86
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	3,29	592.281.000	589.977.195	69,69
					Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	71.385.000	71.060.450	0,45
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi	1	520.896.000	518.916.745	0,38

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja			Program/kegiatan	Capaian	Anggaran		Efisiensi
		Target %	Realisasi %	% capaian			Pagu	Realisasi	
					Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
					Program Perlindungan Perempuan	1	141.840.000	139.640.250	1,55
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	70.000.000	68.984.000	1,45
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	71.840.000	70.656.250	1,65
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,28	30.644.000	30.209.000	22,96
					Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	30.644.000	30.209.000	1,42
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1	31.996.000	31.951.000	0,14
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	31.996.000	31.951.000	0,14
					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	1	142.622.000	140.637.600	1,39
					Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan	1	74.932.000	73.469.800	1,95

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja			Program/kegiatan	Capaian	Anggaran		Efisiensi
		Target %	Realisasi %	% capaian			Pagu	Realisasi	
					Kabupaten/Kota				
					Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	67.690.000	67.167.800	0,77
					Program Perlindungan Khusus Anak	1	262.701.000	256.774.184	2,26
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	75.000.000	74.700.254	0,40
					Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	107.201.000	102.333.076	4,54
					Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	80.500.000	79.740.854	0,94

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Dinsos P3A Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik, untuk sasaran meningkatnya mutu layanan sosial sebesar 6.04%. sedangkan untuk sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebesar 36,86%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keterkaitan sasaran dengan program/kegiatan pendukung dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Keterkaitan sasaran dan program/kegiatan

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian 2023 %	Program/kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	15.00-16.00	16,34	97,87	Program pemberdayaan sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	100	Menunjang
	Meningkatnya mutu layanan social	Prosentase capaian SPM Sosial	100	100	100	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100	Menunjang
						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	Menunjang
						Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	100	Menunjang

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ sasaran	Indikator kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian 2023 %	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
						Desa/Kelurahan Asal			
						Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	104,94	Menunjang
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	104,94	Menunjang
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/IDS Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	Menunjang
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial	107,83	Menunjang
						a. Pengelolaan	Jumlah Dokumen	100	Menunjang

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ sasaran	Indikator kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian 2023 %	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
						Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	data kemiskinan		
						Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
						a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	100	Menunjang
						b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	100	Menunjang
						Program Pengelolaan Taman	Persentase TMP yang dikelola	100	Menunjang
						Pemeliharaan Taman Makam	Persentase TMP yang Dikelola	100	Menunjang
	Meningkatnya perlindungan	Indeks pembangunan gender (IPG)	93,35	93,25	99,89	Program Pengarusutamaan Gender dan	Cakupan Pengarusutamaan Gender	328,59	Menunjang

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ sasaran	Indikator kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian 2023 %	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
	perempuan dan anak					Pemberdayaan Perempuan	dan Pemberdayaan Perempuan		
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	445,76	Menunjang
						Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	97,22	Menunjang
						Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	100	Menunjang
						Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
						Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi	100	Menunjang

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ sasaran	Indikator kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian 2023 %	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
						Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	perempuan korban kekerasan		
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	127,96	Menunjang
						Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100	Menunjang
						Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	100	Menunjang

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ sasaran	Indikator kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian 2023 %	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
						Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	100	Menunjang
						Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
						Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
						Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	100	Menunjang
						Kegiatan Pencegahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan	100	Menunjang

DINSOS P3A | 2023

No	Tujuan/ sasaran	Indikator kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian 2023 %	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
						Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
						Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	Menunjang
						Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi	100	Menunjang
		Rata-rata						119,90	

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

Dari tabel diatas keterkaitan sasaran dan program kegiatan pada Dinsos P3A tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 13 program dan 27 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 119,90 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada telah menunjang tercapainya sasaran kinerja Dinsos P3A Kabupaten Kebumen.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian anggaran program dan kegiatan tahun 2023

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	11.665.670.000	11.222.169.248	443.500.752	96,20
sosial		10.463.586.000	10.032.980.019	430.605.981	95,88
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	4.554.504.000	4.241.248.848	313.255.152	93,12
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.108.000	85.971.500	1.136.500	98,70
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.108.000	66.874.800	233.200	99,65
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.096.700	903.300	95,48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.563.650.000	3.267.437.783	296.212.217	91,69
	penyediaan gaji dan tunjangan asn	3.476.413.000	3.180.383.071	296.029.929	91,48
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.237.000	87.054.712	182.288	99,79
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.904.000	48.902.000	2.000	100

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.904.000	48.902.000	2.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.463.000	187.395.076	67.924	99,96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000	7.185.900	14.100	99,80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.673.000	49.663.900	9.100	99,98
	Pemyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.140.000	19.140.000	0	100
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.982.500	17.500	99,13
	Penyediaan Bahan/Material	25.270.000	25.247.400	22.600	99,91
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.776.000	58.773.876	2.124	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.404.000	25.401.500	2.500	99,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.131.000	73.925.000	206.000	99,72
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.131.000	73.925.000	206.000	99,72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.680.000	237.809.463	11.870.537	95,25
	Penyediaan Surat Menyurat	2.079.000	2.071.400	7.600	99,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.925.000	131.640.663	11.284.337	92,10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.676.000	104.097.400	578.600	99,45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343.568.000	339.808.026	3.759.974	98,91

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	144.042.000	140.370.826	3.671.174	97,45
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.526.000	24.468.400	57.600	99,77
	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	175.000.000	174.968.800	31.200	99,98
2	Program Pemberdayaan Sosial	38.030.000	37.674.020	355.980	99,06
	Pengembangan Potensi Sumber Sosial Daerah Kabupaten/Kota	38.030.000	37.674.020	355.980	99,06
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	28.030.000	27.915.800	114.200	99,59
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000	9.758.220	241.780	97,58
3	Program Penanganan Warga Negara Misrasi Korban Tindak Kekerasan	3.384.000	3.237.350	146.650	95,67
	Pemulangan Warga Negara Migrasi Korban Tindak Kekerasan dari Titik	3.384.000	3.237.350	146.650	95,67

Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				
Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.384.000	3.237.350	146.650	95,67
4 Program Rehabilitasi Sosial	1.833.139.000	1.827.901.786	5.237.214	99,71
Rehabilitasi terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.293.253.000	1.289.746.350	3.506.650	99,73
Penyedia Permukiman	844.145.000	842.637.262	1.507.738	99,82
Penyedia Sandang	90.000.000	88.825.275	1.174.725	98,69
Penyediaan Alat Bantu	112.108.000	111.470.273	637.727	99,43
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	190.000.000	189.943.640	56.360	99,97
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	37.000.000	36.927.800	72.200	99,80
Pemberian Layanan Kedaruratan	20.000.000	19.942.100	57.900	99,71
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	539.886.000	538.155.436	1.730.564	99,68
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20.000.000	20.000.000	0	100
Penyediaan Pemukiman	275.000.000	274.066.436	933.564	99,66
Penyediaan Sandang	40.000.000	39.771.500	228.500	99,43
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	164.886.000	164.485.000	401.000	99,76

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40.000.000	39.832.500	167.500	99,58
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.240.994.000	3.136.613.405	104.380.595	96,78
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.240.994.000	3.136.613.405	104.380.595	96,78
	Pengelola Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	212.118.000	210.618.029	1.499.971	99,29
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.028.876.000	2.925.995.376	102.880.624	96,60
6	Program Penanganan Bencana	779.335.000	772.104.610	7.230.390	99,07
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dari Sosial Kabupaten/Kota	638.276.000	631.760.559	6.515.441	98,98
	Penyediaan Makanan	206.336.000	205.750.311	585.689	99,72
	Penyediaan Sandang	90.760.000	89.880.250	879.750	99,03
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	169.874.000	166.296.865	3.577.135	97,89
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	126.790.000	125.426.500	1.363.500	98,92
	Pelayanan Dukungan Psikososial	44.516.000	44.406.633	109.367	99,75
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	141.059.000	140.344.051	714.949	99,49
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	43.028.000	42.617.951	410.049	99,05
	Koordinasi, Sosialisasi dan	98.031.000	97.726.100	304.900	99,69

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14.200.000	14.200.000	0	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.200.000	14.200.000	0	100
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	14.200.000	14.200.000	0	100
	P3A	1.202.084.000	1.189.189.229	12.894.771	98,93
8	Program Pengarusutaman Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	592.281.000	589.977.195	2.303.805	99,61
	Pelebagaan Pengurusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	71.385.000	71.060.450	324.550	99,55
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	71.385.000	71.060.450	324.550	99,55
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	520.896.000	518.916.745	1.979.255	99,62
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	520.896.000	518.916.745	1.979.255	99,62
9	Program Perlindungan Perempuan	141.840.000	139.640.250	2.199.750	98,45
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	70.000.000	68.984.000	1.016.000	98,55

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
	Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	70.000.000	68.984.000	1.016.000	98,55
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	71.840.000	70.656.250	1.183.750	98,35
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	31.840.000	31.665.300	174.700	99,45
	Koordinasi Dan Sinkronasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/kota	40.000.000	38.990.950	1.009.050	97,48
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	30.644.000	30.209.000	435.000	98,58
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	30.644.000	30.209.000	435.000	98,58
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	30.644.000	30.209.000	435.000	98,58

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	31.996.000	31.951.000	45.000	99,86
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kab/Kota	31.996.000	31.951.000	45.000	99,86
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	31.996.000	31.951.000	45.000	99,86
12	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	142.622.000	140.637.600	1.984.400	98,61
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	74.932.000	73.469.800	1.462.200	98,05
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	74.932.000	73.469.800	1.462.200	98,05
	Pengusaha dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	67.690.000	67.167.800	522.200	99,23
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkatdaerah	67.690.000	67.167.800	522.200	99,23

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
	Kab/Kota				
13	Program Perlindungan Khusus Anak	262.701.000	256.774.184	5.926.816	97,74
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	75.000.000	74.700.254	299.746	99,60
	Koord dan Sinkronasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	75.000.000	74.700.254	299.746	99,60
	Penyediaan Layanan bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	107.201.000	102.333.076	4.867.924	95,46
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	49.201.000	48.787.900	413.100	99,16
	Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	58.000.000	53.545.176	4.454.824	92,32
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	80.500.000	79.740.854	759.146	99,06
	Koordinasi dan Sinkronasi Peningkatan Kapasitas	80.500.000	79.740.854	759.146	99,06

Uraian Program/Kegiatan		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	% capaian
	Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota				
Jumlah		11.665.670.000	11.222.169.248	443.500.752	96,20

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

Berdasarkan tabel 3.16 Realisasi anggaran dan program di tahun 2023 terdapat efisiensi anggaran yang diperoleh dari sisa pagu kontrak, perjalanan dinas, kegiatan yang bersifat penyediaan dan BBM.

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 11.665.670.000,- (sebelas milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Jumlah ini naik dari alokasi anggaran belanja untuk tahun 2022 sebesar Rp 10.995.097.000,-.

Tabel 3.12
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp) 2023	Realisasi (Rp) 2023	%	Realisasi (Rp) 2022
	Belanja	11.665.670.000	11.222.169.248	96,20	9.981.237.844
1	Belanja Operasi	11.577.047.000	11.133.828.948	96,17	9.964.293.044
	Belanja Pegawai	3.526.883.000	3.230.853.071	91,61	3.462.721.004
	Belanja barang dan jasa	4.146.158.000	4.096.152.404	98,79	4.503.875.140
	Belanja hibah	75.000.000	75.000.000	100	20.000.000
	Belanja bantuan sosial	3.829.006.000	3.371.823.473	97,46	1.977.696.900
2	Belanja Modal	88.623.000	88.340.300	99,68	16.944.800
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.623.000	88.340.300	99,68	16.944.800

No	Uraian	Anggaran (Rp) 2023	Realisasi (Rp) 2023	%	Realisasi (Rp) 2022
	Jumlah	11.665.670.000	11.222.169.248	96,20	9.981.237.844

Sumber: Simda Fmis (LRA) Dinas Sosial P3A, 2023

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran. Alokasi anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2023 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 11.665.670.000,- terealisasi sebesar Rp 11.222.169.248,- atau sebesar 96,20%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 443.500.752,- atau sebesar 3,8%.

Berdasarkan realisasi tersebut diatas, Belanja Operasi dari pagu Rp 11.577.047.000,- terserap sebesar Rp 11.133.828.948,- atau 96,17%. Sedangkan untuk belanja modal dari pagu 88.623.000,- terserap sebesar 88.340.300,- atau sebesar 99,68%. Penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 11.222.169.248,- atau 96,20%, Baik.

Secara umum capaian kinerja keuangan jika dibandingkan dengan pencapaian target tahun anggaran 2022, maka pencapaian target penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2022, realisasi penyerapan anggaran mencapai 90,78% dan pada tahun anggaran 2023 menjadi 96,20% mengalami kenaikan sebesar 5,42%.

3.3 Hasil Reviu dan tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022

Tabel 3.13

Reviu evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Indikator kinerja utama (IKU) sesuai dan selaras pada semua dokumen perencanaan	Koordinasi dan bersurat dengan BAPPEDA tentang permohonan reviu Renstra untuk penyelesaian IKU OPD (terlampir)
2	Meningkatkan capaian kinerja dan menyebutkan faktor pendukung dan penghambat dalam capaian kinerja di modul SIMDALEV aplikasi SEMARAK	- Adanya pakta integritas untuk meningkatkan capaian kinerja (terlampir) - Mengisi faktor pendukung dan penghambat dalam capaian kinerja di modul SIMDALEV

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
		aplikasi SEMARAK di tahun 2023 (terlampir)
3	Dalam penyusunan dokumen laporan kinerja, harap menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) atau pembanding lainnya yang diperlukan (standar nasional/RPJMN)	Tindak lanjut dalam penyusunan LKjIP tahun 2023 (akan dicantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional /internasional atau (benchmark kinerja) atau pembanding lainnya yang diperlukan (standar nasional/RPJMN)) (terlampir)
4	Merancang atau menyusun budaya kerja dengan nilai-nilai positif yang mampu mendorong keterlibatan seluru pegawai untuk bersama-sama berkontribusi mencapai tujuan	Akan di buat kan SK budaya kerja Dinsos P3A (terlampir)
5	Meindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal setiap tahunnya	Untuk rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2021 dan 2022 sudah di TL (terlampir)

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2023

3.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial P3A

Tabel 3.14
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial P3A

Triwulan 4 = Tahun 2023			
Jumlah responden			376 orang
Jenis kelamin	Laki-laki	=	135 orang
	Perempuan	=	241 orang
pendidikan	SD	=	54 orang
	SMP	=	73 orang
	SMA	=	75 orang
	DIPLOMA	=	19 orang
	S1	=	17 orang

Triwulan 4 = Tahun 2023			
	S2/S3	=	12 orang
	Lainnya	=	126 orang

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2023

Tabel 3.15
Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pada Unit Penyelenggara Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Triwulan 4 Tahun 2023

No	Nama layanan	Jumlah responden	IKM
1	Rekomendasi kartu indonesia (KIS)	213	98,92
2	Pelayanan surat keterangan tidak mampu (SKTM)	20	99
3	Rekomendasi badan amil zakat nasional (Baznas)	13	98,79
4	Rekomendasi pelayanan JAMKESDA	6	91,67
5	Konsultasi bantuan sosial, PKH dan sembako	7	94,29
6	Rekomendasi adopsi anak	4	90,06
7	Rehabilitasi PGOT dan ODGJ	2	79,75
8	Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gepeng	1	79,75
9	Rekomendasi perpanjangan dan pendirian LKS	1	93,5
10	Layanan korban kekerasan berbasis gender dan anak (KKBGA)	102	90,62
11	Mediasi korban kekerasan berbasis gender dan anak (KKBGA)	7	97,82
	JUMLAH	376	

Sumber : Dinas Sosial P3A, 2023

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial agar dilaksanakan secara optimal sebagaimana dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan berbagai uraian dan beberapa data yang telah disampaikan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.

- 1) Pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah (IKU Daerah), indikator angka kemiskinan pada tahun 2023 adalah sebesar 16,34% dari target 15,00 - 16,00%. Capaiannya adalah sebesar 97,87% dari target. Angka kemiskinan tahun 2023 turun sebesar 0,07% dari tahun 2022 (16,41%). Sedangkan untuk Indeks pembangunan Gender terealisasi sebesar 93,26% dari target 93,35%, atau tingkat capaiannya sebesar 99,90% dari target. Angka IPG ini masih menggunakan asumsi capaian tahun 2022 karena sampai dengan laporan ini disusun, BPS belum merilis capaian IPG Kabupaten Kebumen tahun 2023.

Untuk IKU sasaran baik untuk IKU meningkatnya mutu layanan sosial dan IKU meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak capaiannya adalah 100%.

- 2) Total penyerapan anggaran APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar Rp 11.222.169.248,- atau 96,20% dari total APBD sebesar Rp 11.665.670.000,-, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 9.981.237.844 atau 90,78% mengalami kenaikan sebesar 5,42%.
- 3) Prestasi yang diterima oleh Dinas Sosial P3A sebagai berikut:
 - Piagam Penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023
 - Penganugerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023;
 - Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023.

4.2 Permasalahan / Kendala

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial tentunya dijumpai berbagai macam permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2023, antara lain:

a. Permasalahan/kendala sasaran meningkatnya mutu layanan social

- Dalam pencapaian IKU sasaran Prosentase Capaian SPM Sosial maupun IKU program Rehabilitasi Sosial: Penerima Manfaat terdiri dari kelompok rentan sehingga rawan meninggal dunia dan pindah domisili sehingga diperlukan monitoring maupun evaluasi secara berkala;
- Program penanganan bencana: kejadian bencana tidak dapat diprediksi, sehingga persediaan logistik bencana maupun personil harus selalu siap;
- Program Pemberdayaan Sosial: belum adanya materi pelatihan yang standar dari pemerintah pusat atau provinsi dalam peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan sosial;

- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial: update DTKS belum optimal pada semua desa/kelurahan;
 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan: Migran yang mengalami kekerasan tidak bisa diprediksi;
 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan: penganggaran hanya untuk honor petugas kebersihan.
- b. Permasalahan/kendala sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
- IKU sasaran meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak, Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak:
 - 1) Penanganan Kasus sangat bergantung pada pelaporan kasus kekerasan dari masyarakat, termasuk dari institusi terkait;
 - 2) Pemberi layanan tidak dapat memberikan layanan secara optimal karena korban menolak meneruskan laporan kasusnya;
 - 3) Adanya fakta budaya (keengganan/ malu/ tidak ada keberanian) perempuan korban kekerasan untuk melapor;
 - 4) Belum optimalnya peran KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) dalam pencegahan kasus kekerasan berbasis gender.
 - Program Pengarusutaman Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Belum semuanya kegiatan pemberdayaan perempuan menjangkau ke semua desa
 - 2) Adanya fakta budaya bahwa perempuan tugasnya adalah di rumah dan tugas mencari nafkah adalah laki-laki
 - 3) Rendahnya kepercayaan diri perempuan dibanding laki-laki
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga:
 - 1) Belum semua Kecamatan dan Desa dibentuk Pokja Bina Keluarga TKI (BK TKI)
 - 2) Belum semua kecamatan dan desa paham tentang pentingnya Pokja BK TKI
 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak: Pengumpulan data dari pemberi data sering tidak tepat waktu sehingga pengolahan

data mengalami keterlambatan dan terdapat pemilik data belum memperhatikan pilah gender

- Program Pemenuhan Hak Anak: kegiatan responsif anak belum semuanya sesuai dengan indikator KLA

4.3 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa mendatang antara lain:

a. Meningkatkan mutu layanan social

- Dalam upaya pencapaian IKU sasaran Prosentase Capaian SPM Sosial maupun IKU program Rehabilitasi Sosial adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta berkoodinasi dengan pemerintah desa dan lintas sektoral serta mengusulkan kembali penerima manfaat pengganti di anggaran perubahan apabila terdapat penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah domisili maupun yang tidak memenuhi kriteria;
- Untuk mengantisipasi kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi, usaha yang dilakukan adalah menyiapkan anggaran dan personil yang cukup serta koordinasi dengan pihak terkait yang menangani kebencanaan terkait ketersediaan logistik bencana dan relawan bencana.
- Peningkatan sosialisasi/informasi tentang bantuan untuk Migran yang mengalami kekerasan.
- Untuk peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan sosial mengacu pada perundang-undangan yang berlaku terkait SDM kesejahteraan sosial.
- Untuk menunjang Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dimana update DTKS belum optimal pada semua desa/kelurahan maka dilakukan sosialisasi/pelatihan bagi operator desa/kelurahan.
- Untuk mengoptimalkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Dinsos P3A mengajukan permohonan anggaran untuk pemakaman pahlawan/veteran dan rehabilitasi TMP.

b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

- Dalam upaya pencapaian IKU sasaran meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak, Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak dilakukan dengan:
 - 1) melakukan kerjasama dengan OPD lain yang terkait dan dunia usaha supaya upaya rehabilitasi perempuan dalam bidang ekonom agar korban perempuan berdaya
 - 2) pembentukan UPTD PPA
 - 3) penyusunan perda yang baru terkait perlindungan anak dan Perempuan
 - 4) melakukan Upaya masif baik secara langsung maupun melalui media terkait peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialaminya
 - 5) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan
 - 6) peningkatan kapasitas bagi KPAD (kelompok perlindungan anak desa) untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di wilayahnya masing-masing.
- Dalam upaya mengatasi masalah dalam Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dilakukan dengan:
 - 1) Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dalam peningkatan pemberdayaan perempuan terutama dalam hal pemasaran produk yang sudah diproduksi oleh kelompok Perempuan.
 - 2) Percepatan sosialisasi PUG dan PPRG ke semua desa/kelurahan dengan menambahkan jumlah sasaran sosialisasi
- Dalam upaya untuk mendukung pencapaian target Program Peningkatan Kualitas Keluarga maka dilakukan pembentukan pokja BK TKI di semua kecamatan dan desa.
- Dalam upaya mengatasi masalah dalam Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dilakukan hal sebagai berikut:
 - 1) penambahan volume rakor forum data pilah denger kab. Kebumen setiap tahunnya.
 - 2) data pilah gender dikolaborasikan dengan satu data kab. Kebumen

- Dalam upaya mengatasi masalah dalam Program Pemenuhan Hak Anak dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah kabupaten Kebumen layak anak yang dapat digunakan menjadi salah satu acuan dalam pengembangan KLA di Kab. Kebumen oleh masing-masing anggota gugus tugas KLA (RAD akan dievaluasi setiap tahun).

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah tahun 2023 Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penilaian kinerja yang akan datang.

Kebumen, 29 JAN 2024

Kepala Dinas Sosial Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Sulyanto, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP 196505211986031011

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris	<i>h</i>	
Ka. Bidang		
Subkor	<i>h</i>	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Soekarno Hatta No. 153 Kebumen Telp/Fax (0287) 381518, 381989

Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id

Website : www.dinsosp3a.kebumen.go.id Kode Pos : 54311

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DWI SULIYANTO S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen

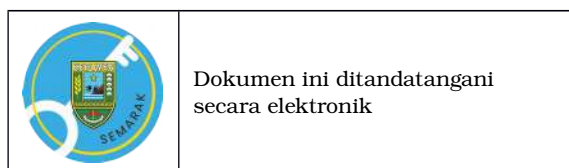
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

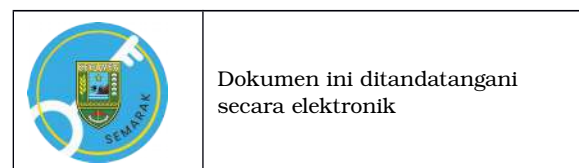
Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

Pihak Pertama,



DWI SULIYANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19650521 198603 1 011



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1.	Meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,35	93,35				93,35
	Sasaran:								
	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak	%	100	100				100
	Tujuan :								
2.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	%	15,00 – 16,00	15,00 – 16,00				15,00 - 16,00
	Sasaran								
	Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM Sosial	%	100	100				100

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.797.660.000	Rp. 4.554.504.000,-	DAU
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 174.880.000	Rp. 38.030.000,-	DAU
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 7.616.000	Rp. 3.384.000,-	DAU
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.811.065.000	Rp. 1.833.139.000,-	DAU
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.386.247.000	Rp. 3.240.994.000,-	DAU



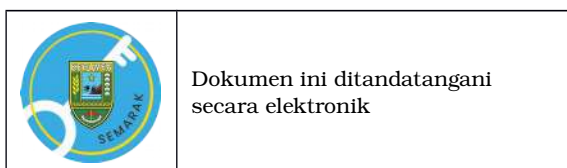
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 760.371.000	Rp. 779.335.000,-	DAU
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 14.000.000	Rp. 14.200.000,-	DAU
8.	Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 592.281.000	Rp. 592.281.000,-	DAU
9.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 75.657.000	Rp. 141.840.000,-	DAU
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 30.644.000	Rp. 30.644.000,-	DAU
11.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 28.313.000	Rp. 31.996.000,-	DAU
12.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 142.622.000	Rp. 142.622.000,-	DAU
13.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 120.518.000	Rp. 262.701.000,-	DAU

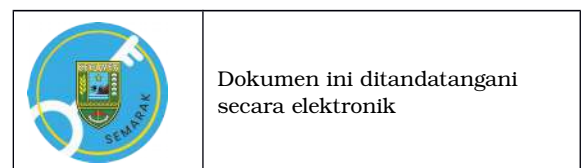
Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.



DWI SULIYANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19650521 198603 1 011



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
SKPD : 1-06.2-08.0-00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi : 1-06.2-08.0-00.01.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1-06.2-08.0-00.01.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	11.665.670.000,00	11.222.169.248,00	96,20	9.981.237.844,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.577.047.000,00	11.133.828.948,00	96,17	9.964.293.044,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.526.883.000,00	3.230.853.071,00	91,61	3.462.721.004,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.146.158.000,00	4.096.152.404,00	98,79	4.503.875.140,00
5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.829.006.000,00	3.731.823.473,00	97,46	1.977.696.900,00
5.2	BELANJA MODAL	88.623.000,00	88.340.300,00	99,68	16.944.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.623.000,00	88.340.300,00	99,68	16.944.800,00
	SURPLUS / DEFISIT	(11.665.670.000,00)	(11.222.169.248,00)	0	(9.981.237.844,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.665.670.000,00)	(11.222.169.248,00)	0	(9.981.237.844,00)



TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA ISTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dan selaras pada semua dokumen perencanaan	koordinasi dan bersurat dengan BAPPEDA tentang permohonan Reviu RENSTRA untuk penyesuaian IKU OPD
2	Meningkatkan capaian kinerja dan menyebutkan faktor pendukung dan penghambat dalam capaian kinerja di modul SIMDALEV aplikasi SEMARAK	- Adanya pakta Integritas untuk meningkatkan capaian kinerja - Mengisi faktor pendukung dan penghambat dalam capaian kinerja di modul SIMDALEV aplikasi SEMARAK di tahun 2023
3	Dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja, harap menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) atau pembandingan lainnya yang diperlukan (Standar nasional / RPJMN)	TL dalam penyusunan LKJIP tahun 2023 (akan dicantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) atau pembandingan lainnya yang diperlukan (Standar nasional / RPJMN))
4	Merancang atau Menyusun budaya kerja dengan nilai-nilai positif yang mampu mendorong keterlibatan seluruh pegawai untuk bersama-sama berkontribusi mencapai tujuan	Akan dibuat SK budaya kerja Dinsos P3A
5	Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal setiap tahunnya	Untuk rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2021 dan 2022 sudah di TL ✓



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta No 153 Kebumen Telp.(0287) 381518, Fax (0287) 381989
Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website :
www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

Kebumen, 1 Agustus 2023

nomor : 000/414
ifat : Penting
ampiran : -
lal : Permohonan Reviu RENSTRA 2021 - 2026 untuk
penyelarasan IKU OPD

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah
di -
TEMPAT

Sehubungan dengan adanya rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 dan perubahan IKU OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sesuai dengan Perbub Nomor 82 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026.

Bersama ini kami mengajukan permohonan Reviu Renstra OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 agar IKU OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Renstra OPD, sesuai dengan Perbub dan dokumen perencanaan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

DWI SULIYANTO, S.SOS.M.SI
Pembina Utama Muda
NIP.196505211986031011



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DWI SULIYANTO, S.Sos., M.Si.

NIP. : 196505211986031011

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Eselon II.b

menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.



Menzaksikan
Bupati Kebumen,

ARIF SUCIYANTO, S.H.

Kebumen, 9 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,


DWI SULIYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 196505211986031011



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. SEHA RAHAYU, M.M.

NIP. : 196711301993032004

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Menyatakan sebagai berikut :

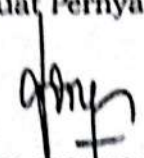
- Patuh dan taat serta loyal kepada pimpinan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kebumen, 31 Desember 2021

Mengetahui / Menyaksikan :
Bupati Kebumen,


H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

Pembuat Pernyataan,


Dra. SEHA RAHAYU, M.M.
NIP. 196711301993032004



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PAKTA INTEGRITAS

ya yang bertanda tangan di bawah ini,


nama : MARLINA INDRIANINGRUM, S.KM., M.Kes.

P. : 197503222000032004

jabatannya : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

menyatakan sebagai berikut :

- Patuh dan taat serta loyal kepada pimpinan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui / Menyaksikan :
Bupati Kebumen,

H. ARIE SUGIYANTO, S.H.

Kebumen, 31 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,


MARLINA INDRIANINGRUM, S.KM., M.Kes.
NIP. 197503222000032004



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MISPARINI HAYUNINGTYAS, S.E.

NIP. : 197406131996032001

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Menyatakan sebagai berikut :

Patuh dan taat serta loyal kepada pimpinan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;

Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

Menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

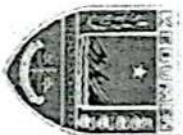
Kebumen, 31 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,

MISPARINI HAYUNINGTYAS, S.E.
NIP. 197406131996032001

Mengetahui / Menyaksikan :
Bupati Kebumen,

H. ARIF SUGIYANTO, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : EKO PRAYITNO, S.T., M.T.

NIP. : 198708202010011008

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Menyatakan sebagai berikut :

1. Patuh dan taat serta loyal kepada pimpinan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui / Menyaksikan :
B U P
Kabupaten/Kebumen,

Kebumen, 31 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,



EKO PRAYITNO, S.T., M.T.

NIP. 198708202010011008



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HENY ROSARIA MARTANTI, S.Psi.

NIP : 197903092010012010

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Menyatakan sebagai berikut :

1. Patuh dan taat serta loyal kepada pimpinan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kebumen, 31 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,

HENY ROSARIA MARTANTI, S.Psi.

NIP. 197903092010012010

Mengertahui / Menyaksikan :
Bupati/Kebumen,

H. ARIF SUGIYANTO, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : GUNAWAN, S.KM., M.M.

NIP. : 196802221989031006

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Menyatakan sebagai berikut :


1. Patuh dan taat serta loyal kepada pimpinan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kebumen, 31 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,

Menggetahui / Menyaksikan :
B U

H. ARIF SUGIYANTO, S.H.


GUNAWAN, S.KM., M.M.
NIP. 196802221989031006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AMBANG SUMIRAT, S.E.

NIP. : 196706171994031008

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda

Menyatakan sebagai berikut :

1. Patuh dan taat serta loyal kepada pimpinan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bakeng P. Alahui / Menyaksikan :
Bupati Kebumen,



SUGIYANTO, S.H.

Pembuat Pernyataan,

AMBANG SUMIRAT, S.E.
NIP. 196706171994031008

Kebumen, 31 Desember 2021

PERIODE PELAKSANAAN : 2025

No	Sektor	Program/Reguler	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Rencana SKPD pada Tahun 2025 (Mula Periode Rencana)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD sampai dengan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan (SDP) yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD pada Tahun 2025 (akhir)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Pelaksana/Pejabat/Pejabat		
				5		6		7		8		9		10		11				
				€	Rp	€	Rp	€	Rp	€	Rp	€	Rp	€	Rp	€	Rp			
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				51.897.392.000		9.345.752.500		9.020.828.000				1.813.514.894		3.023.894.457		4.894.462.000		34.892.350.940		
Kategori/kegiatan Multi-Sektor (Kategori)																				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Citakan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	23.467.396.000	107,25	4.262.850.555	100	3.877.692.800	46,22	570.536.318	21,21	1.155.670.860	67,20	2.077.033.178	174,37	6.290.961.000	174,37	266	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terwujud	6	596.972.000	8	96.054.550	8	80.000.000	5	23.296.900	1	25.325.700	6	40.074.600	34	340.890.000	170	15,48	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	72	18.228.167.000	12	3.481.262.475	12	3.122.777.000	3	767.835.100	3	575.425.400	6	1.705.250.500	28	1.184.940.000	25	22,44	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN
		Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditugaskan Kapesdaswa	33	259.381.000	33	40.941.200	33	40.000.000	50	4.255.000	3	26.044.000	50	30.200.000	81	72.344.000	261,52	27,45	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	1.175.584.000	12	162.727.100	12	144.300.000	3	56.272.258	3	25.627.250	6	25.885.458	28	146.024.000	25	21,21	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111	1.122.681.000	2	9.964.800	14	80.000.000							2	6.964.800	1,8	0,85	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	744.121.000	12	177.625.204	12	181.675.000	3	46.675.853	3	42.657.880	6	81.523.763	28	289.126.947	25	38,17	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669	1.338.480.000	125	242.354.825	77	228.904.000	26	50.694.146	34	72.917.618	60	129.622.794	175	385.678.589	28,24	27,24	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN
		PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	73	1.954.557.000	69	77.635.810	70	174.880.000	2,56	6.422.320	52,56	25.236.280	52,56	21.340.528	52,56	96.781.630	32	5,1	DINAS SOSIAL, PEMERINTAHAN PEREMPUNGAN DAN PERLINDUNGAN

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	2	1.117.979.000	2	71.800.200	2	43.157.000	2	6.426.800	2	7.145.000	2	13.571.800	2	85.372.000	100	7,64	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	19,78	68.585.000	19,05	12.441.100	15,63	30.644.000	10	6.824.000	10	703.800	10	7.527.800	10	19.968.900	50,56	29,12	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	68.585.000	2	12.441.100	2	30.644.000	2	6.824.000	1	703.800	1	7.527.800	1	19.968.900	50	29,12	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pihak Gender dan Anak	100	159.984.000	100	29.832.900	100	28.313.000		5.603.000		6.694.500		12.297.500		42.130.400		26,33	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	159.984.000	1	29.832.900	1	28.313.000		5.603.000		6.694.500		12.297.500		42.130.400		26,33	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	0	952.252.000	100	265.729.054	0	142.622.000		21.135.400		30.093.200		51.228.600		216.957.654		33,29	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3	501.292.000	3	101.000.650	3	74.932.000	2	2.818.800	1	27.318.000	1	30.136.800	1	131.137.450	33,33	26,18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	450.960.000	2	164.728.404	2	67.690.000	1	18.316.600	1	2.775.200	1	21.091.800	1	185.820.204	50	41,21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN IDIUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	100	1.353.161.000	100	176.265.012	100	120.518.000	100	85.504.300	100	22.720.100	100	58.124.400	100	234.489.412	100	17,33	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja
Standar nasional / RPJMN Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran kinerja	Indikator	Capaian		
				OPD	Jawa Tengah	Nasional
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		Tingkat kemiskinan	16,41%	10,93% *BPS JATENG	9,57% *BPS
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%
2	Berkurangnya penduduk miskin		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,26%	92,83% *BPS JATENG	91,63% *BPS
		Meningkatnya mutu layanan sosial	Prosentase capaian SPM Sosial	99,93%	100%	100%



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta No.163 Kebumen Telp.(0287) 381518 Fax (0287) 381989
Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website : www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 360.2/ 6-182

TENTANG

**BUDAYA KERJA DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN,**

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Budaya Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Mengingat :

- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomo 42);
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Kabupaten/ Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :
Membentuk Budaya Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, dengan nama Budaya Kerja PANCEN ELOK (Pandai, Cekatan, Enerjik, Loyalitas dan Kreatif)

KEDUA :
Menetapkan Susunan Organisasi Budaya Kerja yang terdiri atas penanggungjawab, fasilitator, ketua, sekretaris dan anggota dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab mempunyai tugas:
 - a. bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Budaya Kerja (BK);
 - b. menyediakan sarana dan prasarana untuk BK;
 - c. mendorong BK untuk berperan aktif, dan
 - d. menindaklanjuti hasil pemikiran BK;
2. Fasilitator mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan BK;
 - b. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
 - c. mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan BK;
 - d. menciptakan hubungan yang baik antara BK dan Penanggungjawab;
 - e. mengikuti perkembangan aktifitas BK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktifitas BK kepada Penanggungjawab;
 - f. membangkitkan kembali semangat BK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahan;
3. Ketua mempunyai tugas:
 - a. berperan aktif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan BK;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan dalam melaksanakan BK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara BK dengan Penanggungjawab dan Fasilitator;
 - d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktifitas BK kepada Penanggungjawab, dan;
 - e. mendorong BK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan;
4. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan BK;
 - b. melaksanakan tugas – tugas sekretariatian BK;
 - c. membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis kegiatan BK;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan BK;
5. Anghola mempunyai tugas:
 - a. Berperan aktif dalam kegiatan BK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh Anggota;
 - c. melaksanakan kegiatan BK;

KETIGA

Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kerja aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara profesional
- Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud Dikirim **KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 3 Agustus 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUBUMEN

NOMOR: 360.2/6182
TENTANG PEMBENTUKAN BUDAYA
KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUBUMEN TAHUN 2023

SUSUNAN ORGANISASI BUDAYA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUBUMEN
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	DWI SULIYANTO, S.Sos.M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggungjawab
2.	SITI NURIATUN FAOZIYAH, S.Ag., M.Si	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	LIFTYAWATI ANGGRAENI, S.E.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sekretaris
4.	HENY SETYOWATI, SE, Ak, M.Ak	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Fasilitator
5.	Dra. SEHA RAHAJU, M.M.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Fasilitator
6.	MARLINA INDRIANINGRUM, S.KM, M.Kes	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitator
7.	ARUM DWI LESTARI NINGSIH, S.Kep., MM	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUBUMEN





TINDAK LANJUT

**REKOMANDASI HASIL EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)**

TAHUN 2021

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Soekarno Hatta No. 153 Kebumen Telp (0287) 381518 Fax (0287) 381599
Email : dinsosp3a@kebumenhk.go.id Website : www.dinsosp3a.kebumenhk.go.id
Kode Pos : 54311

BERITA ACARA

REVIEW RENSTRA DAN IKU TAHUN 2021-2026 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 050/1841

TANGGAL: 09 Mei 2022

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 153 Kab. Kebumen telah melaksanakan reviu Renstra dan IKU Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala, dengan hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Berkurangnya Penduduk Miskin

b. Rekomendasi tentang Tujuan

Masih sesuai, tidak ada perubahan

c. Uraian Tujuan Setelah Reviu

1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Berkurangnya Penduduk Miskin

II. INDIKATOR TUJUAN

a. Indikator Tujuan I :

1. Indikator Tujuan I

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,25
- Cakupan Perlindungan Anak sebesar 100%

2. Indikator Tujuan II

- Tingkat Kemiskinan sebesar 16,00 – 17,00

b. Rekomendasi Indikator tentang Tujuan

Masih sesuai, tidak ada perubahan

c. Uraian Indikator Tujuan Setelah Reviu

1. Indikator Tujuan I

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,25
- Capaian Perlindungan Anak sebesar 100%

2. Uraian Indikator Tujuan II

- Tingkat Kemiskinan sebesar 16,00-17,00

III. SASARAN

- a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu
 1. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
 2. Meningkatkan Mutu Layanan Sosial
- b. Rekomendasi tentang Sasaran
Masih sesuai tidak ada Perubahan
- c. Uraian Sasaran Setelah Reviu
 1. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
 2. Meningkatkan Mutu Layanan Sosial

IV. INDIKATOR KINERJA SASARAN

- a. Uraian Indikator Sasaran Sebelum Reviu
 1. Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 2. Persentase Capaian SPM
- b. Rekomendasi Tentang Indikator Kinerja Sasaran
Masih sesuai tidak ada perubahan
- c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran
 1. Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 2. Persentase Capaian SPM

V. INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Uraian Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu

No	Urusan	Indikator	Satuan	Target						Pena nggu ngja wab	
			Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	Sosial	Persentase Capaian SPM Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Dins os P3A
2	Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak	Persentase Penangan an Kekerasan terhadap Perempua n dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	Dins os P3A

b. Rekomendasi Tentang Indikator Kinerja Utama

Masih sesuai tidak ada perubahan

o. Uraian Indikator Kinerja Utama Setelah Revlu

No	Urusan	Indikator	Tingkat						Pemb nugiv wab Dinas P3A		
			Sa tu an	Kondisi 2020 Awal	2021	2022	2023	2024		2025	2026
1	Sosial	Persentase Capaian SPM Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P3A
2	Pembert ayaan Perempu an dan Peritudun gan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P3A

Demikian Berita Acara Ini dibuat dan diaahkan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen

Kebumen, 9 Mei 2022
Tim revlu Renstra dan IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekretaris : Mukhammad Mubarak, S.Pd, M.GI
Anggota : Ika Kusuma Siswandari, S.E, M.Kes
Anggota : Elis Joko Widodo, S.H
Anggota : Dra. Seha Rahayu, M.M
Anggota : Marlina Indriahngrum, S.KM, M.Kes






PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Soekarno Hatta No.153 Kebumen Telp.(0287) 381518 Fax (0287) 381989
Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website :
www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yaitu dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Koordinasi berkala untuk peningkatan kinerja
2. Pemantauan kinerja dalam rangka mencapai kinerja/target
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan

E. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja agar target yang direncanakan tercapai adalah :

1. Pembinaan Rutin terhadap Pegawai
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
3. Melaksanakan Pelaporan Berkala

Mengetahui,
Kebumen, 9 Mei 2022

Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak








PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak &
	Nama SOP	Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Peraturan Perundangan yang terkait2 Memahami sasaran dan capaian program3 Mengetahui tugas pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas Sosial P3A4 Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra OPD	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Penyusunan Renstra2 SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Sasaran Kerja Pegawai)3 SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja4 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1 Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan program2 Alat tulis kantor3 Komputer/Laptop, LCD, Printer, HVS	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat	<ol style="list-style-type: none">1 Kepala OPD : Lembar Disposisi; Tanda Tangan2 Sekretaris OPD : Lembar Disposisi; Paraf3 Sub Koordinator Perencanaan : Lembar Disposisi; Paraf Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy	

SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Aktivitas	Sub Koordinator Perencanaan	Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana, Program dan Laporan	Pelaksana		Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Bidang	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
				Kasub	Kepala Bidang						
1	Memertintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian							Dokumen	5	Dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian							Dokumen	5	Dokumen format data	
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kepada masing-masing Kepala Bidang							Dokumen	10	Dokumen format data	
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Jabatan Fungsional Sub Koordinator Perencanaan							Dokumen	480	Rekap Dokumen	

5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Kasubag Umum dan Kepegawaian yang telah terkumpul				Dokumen	480	Rekap Dokumen
6	Menganalisa data dan mengevaluasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kegiatan				Dokumen	480	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan

PRESTASI YANG TELAH DICAPAI DI TAHUN 2023

No	Nama Penghargaan	Kategori / Peringkat	Pemberi Peringkat
1	Piagam Penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “ Pelayanan Prima” Tahun 2023	Pelayanan Prima	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Penganugerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023	Opini kualitas tertinggi Zona Hijau (skor nilai 88,33 dari skala 100)	Ombudsman RI
3	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023	Madya	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI

